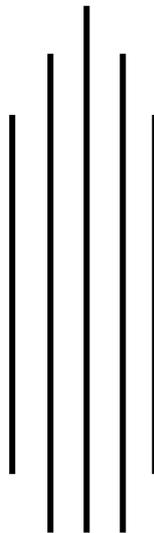




PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI
HASIL RENJA PD
TRIWULAN I**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**PANGKALPINANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat, bimbingan dan hidayah-Nya, penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Laporan Pengendalian dan Evaluasi hasil rencana kerja perangkat daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 ini merupakan laporan evaluasi hasil renja 2021 per triwulanan yang disusun untuk mengevaluasi hasil renja perangkat daerah baik berupa capaian kinerja dan keuangan dan merupakan capaian kinerja yang diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, capaian kinerja tersebut merupakan tolak ukur yang berkaitan erat dengan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah berdasarkan Renstra Perangkat Daerah. Evaluasi perumusan kebijakan sehingga Renja Perangkat Daerah secara lengkap memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, target kinerja dan pagu indikatif.

Dalam penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi hasil rencana kerja perangkat daerah ini masih banyak kekurangan, baik dalam penulisan, penyajian dan substansi materinya, karena itu masukan dan saran untuk perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Demikian laporan hasil pengendalian dan evaluasi disusun, semoga dapat memberikan manfaat bagi pembangunan di Bumi Serumpun Sebalai.

Pangkalpinang, April 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

**DARLAN S.Pd.,M.M
Pembina Utama Muda
NIP.19691206 200212 1 001**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1	
DAFTAR ISI	2	
BAB I	PENDAHULUAN	3
	1.1. Latar Belakang	3
	1.2. Maksud dan Tujuan	3
	1.3. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	4
	1.4. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	4
BAB II	EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA	7
	2.1. Perbandingan Antara Program/Kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah Terhadap Program/Kegiatan di dalam Renstra Perangkat Daerah	7
	2.2. Laporan Kemajuan Kegiatan Triwulan I Tahun Anggaran 2021	8
BAB III	KENDALA DAN SARAN TINDAK LANJUT	15
	3.1. Kendala	15
	3.2. Saran Tindak Lanjut	15
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Untuk menjamin bahwa Renja Perangkat Daerah telah menjabarkan Renstra Perangkat Daerah dengan baik, maka perlu dilakukan Evaluasi hasil renja. Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah dilakukan setiap Triwulan sesuai dengan aliran dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berjalan berupa anggaran kas (angkas) yang dibagi setiap triwulan.

Evaluasi hasil renja Perangkat Daerah baik berupa kinerja dan keuangan merupakan capaian kinerja yang diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, capaian kinerja tersebut merupakan tolak ukur yang berkaitan erat dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah berdasarkan Renstra Perangkat Daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya laporan pengendalian dan evaluasi hasil renja perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Sinkronisasi pengeluaran keuangan antara aliran kas perangkat daerah per triwulan dengan realisasi anggaran per triwulan, Realisasi anggaran perangkat daerah Triwulan I sebesar Rp173.418.903,-;
- b. Mengetahui capaian kinerja dan keuangan per triwulan;
- c. Menemukan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan tidak tercapainya realisasi anggaran per triwulan berdasarkan target pengeluaran yang ada di aliran kas perangkat daerah.

Tujuan Laporan pengendalian dan evaluasi hasil renja perangkat daerah adalah tercapainya pengendalian dan evaluasi hasil renja perangkat daerah dan kesesuaian antara target dengan capaian kinerja dan keuangan sehingga akuntabilitas kinerja perangkat daerah semakin maksimal.

1.3. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan tujuan yaitu meningkatnya investasi dengan sasaran yaitu meningkatnya nilai realisasi investasi.

1.4. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Program dan Kegiatan, Indikator kinerja dan Kelompok sasaran Tahun 2021, ditetapkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas DPMPTSP melalui pelayanan kesekretariatan, program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan yaitu :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan yaitu :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Penyediaan Bahan/Material;
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan yaitu :
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan yaitu :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- Program ini dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dengan sub kegiatan yaitu Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
 - b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi dengan sub kegiatan yaitu :
 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi;
 - Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi;
3. Program Promosi Penanaman Modal
- Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan sub kegiatan yaitu :
- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi;
 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi;
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
- Program ini dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan;
 - b. Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan sub kegiatan yaitu;
 - Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
 - Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan;

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan sub kegiatan yaitu :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal;
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi.

BAB II
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA

2.1. Perbandingan antara Program/kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah terhadap Program/Kegiatan di dalam Renstra Perangkat Daerah .

No	Program/Kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah TA. 2021	No	Program/Kegiatan di dalam Renstra Perangkat Daerah TA. 2017-2022
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
	Kegiatan:		Kegiatan:
	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah		- Administrasi Umum Perangkat Daerah
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	Kegiatan:		Kegiatan:
	- Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		- Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
	- Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi		- Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
3.	Program Promosi Penanaman Modal	3.	Program Promosi Penanaman Modal
	Kegiatan:		Kegiatan:
	- Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		- Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	4.	Program Pelayanan Penanaman Modal
	Kegiatan:		Kegiatan:
	- Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		- Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	- Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		- Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
6.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	6.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
	- Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi		- Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi

LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN

TRIWULAN I

TAHUN ANGGARAN 2021

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d TW I		Realisasi			Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
				(%)	(Rp)	(%)	Rp	%		
2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
2 18 01 1,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.862.113,00	0,00	54,20%	34.068.353,00	0,00%	0,00	0,00%	-	-
2 18 01 1,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.794.871,00	0,00	63,84%	32.429.053,00	0,00%	0,00	0,00%	-	-
2 18 01 1,01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.067.242,00	0,00	13,58%	1.639.300,00	0,00%	0,00	0,00%	-	-
2 18 01 1,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	747.766.383,00	0,00	8,55%	63.940.696,00	0,30%	2.270.550,00	0,30%	-	-
2 18 01 1,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.999.720,00	0,00	8,56%	1.539.976,00	0,00%	0,00	0,00%	-	-
2 18 01 1,06 01 UPTD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.999.421,00	0,00	11,11%	1.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	-	-

2 18 01 1,06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	-
2 18 01 1,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.180.000,00	0,00	22,41%	2.729.000,00	0,00%	0,00	0,00%	-	-
2 18 01 1,06 04 UPTD	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.300.000,00	0,00	18,91%	435.000,00	0,00%	0,00	0,00%	-	-
2 18 01 1,06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53.996.584,00	0,00	6,30%	3.399.658,00	1,81%	980.000,00	1,81%	-	-
2 18 01 1,06 05 UPTD	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.999.792,00	0,00	15,02%	2.703.667,00	2,17%	390.550,00	2,17%	-	-
2 18 01 1,06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	35.000.000,00	0,00	22,86%	8.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	-	-
2 18 01 1,06 06 UPTD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000,00	0,00	25,00%	750.000,00	0,00%	0,00	0,00%	-	-
2 18 01 1,06 07	Penyediaan Bahan/Material	90.748.220,00	0,00	7,78%	7.058.198,00	0,00%	0,00	0,00%	-	-
2 18 01 1,06 07 UPTD	Penyediaan Bahan/Material	11.996.646,00	0,00	15,00%	1.799.497,00	0,00%	0,00	0,00%	-	-
2 18 01 1,06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	51.000.000,00	0,00	9,22%	4.700.000,00	1,76%	900.000,00	1,76%	-	-
2 18 01 1,06 08 UPTD	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.000.000,00	0,00	9,38%	750.000,00	0,00%	0,00	0,00%	-	-
2 18 01 1,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	349.757.000,00	0,00	7,14%	24.975.700,00	0,00%	0,00	0,00%	-	-
2 18 01 1,06 09 UPTD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.789.000,00	0,00	6,33%	4.100.000,00	0,00%	0,00	0,00%	-	-

2 18 01 1,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.199.216.829,00	0,00	16,00%	191.911.719,00	14,09%	168.948.353,00	14,09%	-	-
2 18 01 1,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.950.000,00	0,00	7,17%	1.000.000,00	7,17%	1.000.000,00	7,17%	-	-
2 18 01 1,08 01 UPTD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.192.000,00	0,00	10,01%	720.000,00	5,95%	428.000,00	5,95%	-	-
2 18 01 1,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	162.200.000,00	0,00	19,61%	31.800.000,00	11,03%	17.891.907,00	11,03%	-	-
2 18 01 1,08 02 UPTD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.200.000,00	0,00	25,00%	6.300.000,00	18,37%	4.628.446,00	18,37%	-	-
2 18 01 1,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	712.274.126,00	0,00	15,44%	109.991.719,00	14,66%	104.400.000,00	14,66%	-	-
2 18 01 1,08 04 UPTD	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	278.400.703,00	0,00	15,12%	42.100.000,00	14,58%	40.600.000,00	14,58%	-	-
2 18 01 1,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172.774.406,00	0,00	9,16%	15.822.324,00	1,27%	2.200.000,00	1,27%	-	-
2 18 01 1,09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.330.000,00	0,00	3,52%	2.333.000,00	3,32%	2.200.000,00	3,32%	-	-
2 18 01 1,09 02 UPTD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.050.000,00	0,00	21,69%	8.470.170,00	0,00%	0,00	0,00%	-	-
2 18 01 1,09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.907.906,00	0,00	6,69%	2.335.295,00	0,00%	0,00	0,00%	-	-
2 18 01 1,09 06 UPTD	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.360.000,00	0,00	12,86%	1.204.000,00	0,00%	0,00	0,00%	-	-

2 18 01 1,09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.999.440,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	-
2 18 01 1,09 09 UPTD	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.928.000,00	0,00	10,07%	1.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	-	-
2 18 01 1,09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.199.060,00	0,00	15,00%	479.859,00	0,00%	0,00	0,00%	-	-
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL									
2 18 02 1,01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi	187.785.930,00	0,00	21,10%	39.614.831,00	0,00%	0,00	0,00%	-	-
2 18 02 1,01 02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	187.785.930,00	0,00	21,10%	39.614.831,00	0,00%	0,00	0,00%	-	-
2 18 02 1,02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	190.405.649,00	0,00	8,54%	16.252.193,00	0,00%	0,00	0,00%	-	-
2 18 02 1,02 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	40.407.724,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	-
2 18 02 1,02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	149.997.925,00	0,00	10,83%	16.252.193,00	0,00%	0,00	0,00%	-	-
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL									

2 18 03 1,01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	346.234.792,00	0,00	14,06%	48.664.092,00	0,00%	0,00	0,00%	-	-
2 18 03 1,01 01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	14.015.809,00	0,00	100,00%	14.015.809,00	0,00%	0,00	0,00%	-	-
2 18 03 1,01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	332.218.983,00	0,00	10,43%	34.648.283,00	0,00%	0,00	0,00%	-	-
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL									
2 18 04 1,01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	36.549.268,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	-
2 18 04 1,01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	36.549.268,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	-
2 18 04 1,02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	326.910.712,00	0,00	14,86%	48.587.294,00	0,00%	0,00	0,00%	-	-
2 18 04 1,02 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	36.649.728,00	0,00	24,05%	8.812.500,00	0,00%	0,00	0,00%	-	-

2 18 04 1,02 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	282.010.990,00	0,00	14,10%	39.774.794,00	0,00%	0,00	0,00%	-	-
2 18 04 1,02 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	8.249.994,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	-
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL									
2 18 05 1,01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	733.732.087,00	0,00	15,02%	110.175.402,00	0,00%	0,00	0,00%	-	-
2 18 05 1,01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	179.481.493,00	0,00	11,15%	20.014.000,00	0,00%	0,00	0,00%	-	-
2 18 05 1,01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	343.181.851,00	0,00	26,27%	90.161.402,00	0,00%	0,00	0,00%	-	-
2 18 05 1,01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	211.068.743,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	-
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL									

2 18 06 1,01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	57.615.747,00	0,00	15,00%	8.642.362,00	0,00%	0,00	0,00%	-	-
2 18 06 1,01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	57.615.747,00	0,00	15,00%	8.642.362,00	0,00%	0,00	0,00%	-	-
		4.061.853.916,00	0,00	14,22%	577.679.266,00		173.418.903,00	4,27%		

BAB III

KENDALA DAN SARAN

3.1. Kendala

1. Adanya Pandemi Covid-19 sehingga capaian output kegiatan dan penyerapan anggaran kurang maksimal;
2. Masih kurangnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditempatkan di loket pelayanan dan bagian pemrosesan izin pada Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu.

3.2. Saran Tindak Lanjut

Perlunya dukungan aparatur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang mempengaruhi tingkat ketelitian dalam memproses berkas serta tingginya beban kerja yang mempercepat kejenuhan pegawai ASN dalam bertugas. Kualifikasi jabatan yang diperlukan untuk tambahan ASN di Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu adalah :

- a. Arsiparis;
- b. Programmer Komputer;
- c. Pengadministrasi Umum.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Evaluasi perumusan kebijakan sehingga Renja PD secara lengkap memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, target kinerja dan pagu indikatif;
2. Evaluasi hasil renja PD dilakukan setiap triwulan, meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi;
3. Realisasi pelaksanaan program/kegiatan hanya dapat dilaporkan jika PPTK melakukan evaluasi capaian kinerja dan identifikasi kendala dan saran tindak lanjut;
4. Tujuan evaluasi hasil Renja PD adalah untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam Renja PD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan nasional;
5. Tertib pelaporan hasil evaluasi Renja PD harus dilakukan tepat waktu, kesesuaian pengisian format, keakurasian data dan informasi, diketahui dan disetujui Kepala OPD.